



MENDONGKEL TIAP LAPIS 'BOROK' RAFAEL

Transaksi Rp 500 M Dibekukan, Diduga Terkait Terpidana Suap Angin Prayitno

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status perkara eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Rafael Alun Trisambodo, ke tahap penyelidikan dari klarifikasi. Satu per satu 'borok' yang selama ini tertutup rapat, didongkel ke permukaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang diblokir senilai Rp500 miliar. Bahkan, KPK juga akan mendalami potensi kaitan antara Rafael Alun dengan Angin Prayitno Aji, eks pegawai pajak terpidana kasus gratifikasi dan suap pajak senilai Rp 55 miliar. Di sisi lain, Rafael Alun Trisambodo dipecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rafael dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Duh!

(Baca Hal 11)

BEBERAPA PEGAWAI PAJAK DALAM PUSARAN KASUS



1. GAYUS TAMBUNAN

Pegawai DJP golongan III A Gayus Tambunan terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) dengan kerugian Rp 570,92 juta. Selain itu ia juga memberikan uang kepada polisi total 10.000 dolar Amerika Serikat (AS), memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 dolar AS, dan terbukti memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai Rp 28 miliar yang diduga dari hasil korupsi. Ia juga melakukan penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, pencucian uang, penyuaipan penjaga tahanan Brimob Kelapa Dua Depok, serta pemalsuan paspor. Gayus dijatuhi hukuman total 29 tahun penjara.



2. HANDANG SOEKARNO

Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar 148.500 dolar AS atau senilai Rp 1,9 miliar dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia R Rajamohanan Nair. Handang menerima vonis 10 tahun penjara dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah sejak Selasa (1/8/2017).



3. DHANA WIDYATMIKA

Pegawai DJP Dhana Widyatmika terbukti menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dhana dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebanyak Rp 1 miliar. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian. Atas tindakan ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi tiga bulan kurungan pada Jumat (9/11/2012).



4. WAWAN RIDWAN

Mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJP Kemenkeu Wawan Ridwan dinilai menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar dan suap senilai Rp 6,4 miliar. Akibatnya, Wawan dituntut 10 tahun penjara, pidana denda senilai Rp 300 juta, dan denda tambahan Rp 2,373 miliar subsidi 2 tahun penjara pada Senin (30/5/2022) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta



5. ANGIN PRAYITNO AJI

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023). Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 40 miliar dan melakukan TPPU. Ini kali kedua ia berurusan dengan meja hijau. Sebelumnya ia divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Angin Prayitno kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, Angin Prayitno juga dihukum dengan pidana tambahan dan harus membayar Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura.



Usai Depo Plumpang Terbakar, Warga Bertanya-tanya Soal Ganti Rugi

JAKARTA – Warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTM) akan melayangkan surat pertanggung jawaban kepada PT Pertamina (Persero). Hal itu sehubungan dengan belum adanya statement resmi dari perusahaan milik pemerintah itu untuk ganti rugi terhadap warga terdampak kebakaran.

"Kami warga mau melayangkan surat ke Pertamina meminta pertanggung jawaban kongkrit terhadap kerugian materiil dan non materiil," ujar Ketua FKTM Mohamad Huda Selasa (7/3/2023).

Pasalnya, kata Huda, hingga saat ini pihak Pertamina belum memberi statement resmi terkait dengan kerugian harta benda milik warga yang terkena dampak kebakaran hebat tersebut.

"Sampai hari ini tidak jelas terkait ganti rugi harta benda dan bangunan rumah warga yang habis karena kebakaran yang disebabkan oleh Pertamina," ucapnya.

"Tidak ada tanggung jawab yang jelas," sambung Huda.

Saat ditanya waktu pelayangan surat tersebut, ia belum menentukan waktunya. "Secepatnya," singkat Huda.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pengobatan dan santunan kepada korban kebakaran pipa Terminal BBM (TBBM) Plumpang di Koja, Jakarta Utara.

"Dalam hal ini kami ingin menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Sabtu.

Diberi Rp 10 Juta agar Tak Dituntut?

Di sisi lain, Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan Bambang Setiono mengatakan, pihaknya mendapat laporan ada keluarga korban tewas



Suasana pemukiman warga hangus terbakar dampak kebakaran depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta Utara (istimewa)

akibat Kebakaran Depo Plumpang dikasih uang Rp10 juta, tapi diminta tidak boleh melayangkan tuntutan kepada Pertamina.

Kabar tersebut didapatnya setelah adanya proses pemakaman korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Iya, kemarin ada yang mengadu ke saya ngomongnya begitu," kata Bambang di Markas PMI pada Jakarta Utara (Jakut), Selasa (7/3/2023).

Namun sejauh ini, baru satu warga yang melaporkan terkait hal ini kepada dirinya.

Bambang mengemukakan, kejadian tersebut bermula saat Irianto yang merupakan ahli waris korban dari Iriana, mengadukan kepadanya. Irianto mengaku, uang Rp10 juta diberikan orang tak dikenal saat prosesi pemakaman sang adik.

"Terus keluarganya bilang 'Pak, ini adik dikasih uang Rp10 juta, tapi suruh tanda tangan ini di atas materai' uang santunan, terus bahasanya di situ jangan menuntut Pertamina," kata Bambang.

Irianto yang sudah menerima uang tersebut pun kebingungan, lantaran adiknya menerima uang tersebut secara sepihak.

"Kemarin bilang

'saya nggak mau, pak, tapi adik saya sudah menerima gimana ya?' Saya tanya yang ngasih siapa? 'Nggak tahu'," ucapnya.

Larangan tersebut ternyata bukan hanya lisan, kata Bambang, melainkan juga tertulis dalam surat bermaterai yang telah ditanda tangai adik Irianto.

Bambang menuturkan, ada 9 warganya yang menjadi korban tewas dalam musibah ini. Mereka tersebar di dua RT, yakni RT 6, dan RT 5.

"Di kita RT 6 ada 5, RT 5 ada 4, total 9 (korban tewas)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran hebat melanda pemukiman warga yang terletak di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Kebakaran tersebut juga disertai ledakan hebat saat api sedang berkobar.

Buntut musibah tersebut, berdasarkan data dari Koramil 01 Koja, ada 18 orang dinyatakan meninggal dunia. Dalam data tersebut, 17 di antaranya merupakan jenazah sementara 1 merupakan bagian tubuh atau body part.

Dari belasan orang yang dinyatakan meninggal dunia, 5 diantaranya telah teridentifikasi. 3 orang teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan tim DVI di RS Polri, sementara 2 lainnya teridentifikasi oleh RSPP.

PT Pertamina Patra Niaga merespons terkait isu pihaknya memberi uang Rp 10 juta pada warga yang menjadi korban kebakaran Depo Plumpang agar tidak mengajukan gugatan terhadap Pertamina.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Deny Djukardi

mengatakan, ia akan mengonfirmasi hal tersebut lebih lanjut.

"Nanti saya konfirmasi lagi ya terkait seperti itu," kata Deny, saat ditemui dalam acara doa bersama, di RPTRA Rasela, Jakarta Utara. "Terkait dengan pemberian itu, nanti saya konfirmasi dengan tim kami di Plumpang," sambung Deny.

Adapun Deny menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendata masing-masing korban, termasuk ahli waris.

"Karena kami juga masih mendata masing-masing korban baik yang ahli waris juga tentunya. Ini masih kita coba data," ungkapnya. (wid,rls,ist,dya)

DEPO PLUMPANG DIPINDAHKAN

○ DIPINDAHKAN KE TANAH PELINDO

Relokasi ke tanah Pelindo ini diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024.

○ PROSES PEMBANGUNAN

Pengerjaan dibutuhkan selama 2-2,5 tahun. Diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.

○ ZONA AMAN (BUFFER ZONE)

Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.



Geger Putusan Tunda Pemilu, Meski Reses DPR Upayakan Gelar Raker dengan KPU



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia

JAKARTA - Komisi II DPR RI disebut mengupayakan menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, utamanya KPU, terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menargetkan bahwa Rapat Kerja itu digelar pekan ini, meski saat ini dalam masa reses.

"Menunggu izin dari pimpinan (DPR RI), sampai sekarang izinnya belum turun," kata Doli ketika dihubungi pada Selasa (7/3/2023).

"Waktunya cuma minggu ini, kalau enggak ya minggu depan di masa reses. Karena di masa reses harus ada izin pimpinan," ia menambahkan.

Doli menyebut bahwa DPR RI merasa kaget dengan putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) agar majelis hakim menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu tersisa dan mengulanginya lagi sejak awal.

Hal ini dikhawatirkan berimbas pada penundaan Pemilu 2024. "Kita kaget juga dan saya langsung komunikasi dengan pimpinan Komisi II makanya kita sepakat untuk diadakan rapat," kata dia.

"Kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari KPU langsung sebagai tergugat. Selama ini kita kan tidak tahu, karena memang urusan internalnya mereka," lanjut Doli.

Politikus Golkar itu mengaku ingin tahu bagaimana sikap dan tindakan KPU selama ini, termasuk ketika menjadi tergugat dalam gugatan perdata PRIMA di PN Jakpus.

"Sikap mereka seperti apa, jawaban mereka seperti apa, sehingga putusannya sampai begitu. Enggak diurus, atau gimana? Kan pengin tahu kita," ujar Doli.

Ia berharap, Rapat Kerja ini dapat menyepakati kesimpulan bahwa KPU akan mengajukan

banding terhadap putusan PN Jakpus.

Meskipun komitmen untuk banding itu sudah disampaikan KPU secara terbuka lewat media massa, Doli merasa bahwa komitmen itu akan lebih memiliki legitimasi apabila menjadi kesimpulan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Ini kan sekarang jadi liar, masyarakat ada yang bingung pemilu jadi atau tidak. Jadi kita mau mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat," ungkap Doli.

Kemendagri Sebut Tak Pengaruhi Proses

Terpisah, Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] merespons putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024. Putusan itu dinilai tidak memengaruhi pelaksanaan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali karena telah diamanatkan dalam konstitusi.

"Putusan Pengadilan Negeri tidak

berdampak apa pun terhadap eksistensi UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan begitu pula eksistensi UUD Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak 2024," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar kepada awakmedia, Selasa (7/3/2023).

Bahtiar mengatakan pengadilan negeri tak memiliki kewenangan mengubah substansi UUD dan undang-undang. Putusan itu, kata dia, melampaui batasan wewenang karena cacat dan tak bernilai hukum. "Saya berpendapat bahwa KPU banding atau pun tak banding, tahapan pemilu tetap dilanjutkan, dan penyelenggara pemilu boleh abaikan substansi putusan pengadilan negeri terkait pemilu," ucap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan Kemendagri bersama Komisi II DPR RI mendukung sukses penyelenggaraan pemilu 2024. Ia mengatakan pemilu adalah amanah konstitusi, sebagai sarana untuk memilih pemimpin nasional secara ajek tiap lima tahun sekali. "Kepentingan negara yang lebih luas, harus diutamakan oleh siapa pun penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan pemilu tidak boleh terganggu oleh hal apa pun ihwal penyelenggaraan pemilu.

KPU Tak Pakai Pengacara

KPU tidak menggunakan pengacara eksternal dalam menghadapi gugatan Partai Prima di PN Jakpus. Dalam perkara itu, PN Jakpus mengabulkan gugatan yang berimbas pada penundaan Pemilu 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asyari menyebut PN tidak memiliki kompetensi dalam mengadili perkara sengketa atau gugatan partai politik.

"Gugatan dan sengketa tentang partai politik jalurnya adalah Bawaslu dan PTUN. Dengan demikian ketika

perkara dibawa ke ranah gugatan perdata ke PN Jakpus, KPU berpendapat hal tersebut bukan kompetensi PN (Pengadilan Negeri)," kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2023).

Dalam salinan putusan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tertulis KPU sebagai tergugat mengirimkan 43 pihak internal termasuk Komisioner KPU, Deputi Bidang Teknis, dan Kepala Biro Bidang Hukum untuk diberikan hak bersuara dalam persidangan. Namun, tidak ada nama pengacara eksternal atau saksi yang dihadirkan oleh KPU.

Hasyim menganggap KPU sebagai pelaksana Pemilu adalah lembaga yang sudah cukup untuk menolak dalil gugatan Pengadu (Partai Prima). "KPU ini sebagai pelaku kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai, jadi KPU ini adalah pihak yang tahu urusan tersebut."

Namun demikian, dalam salinan putusan PN Jakpus itu Majelis Hakim menyebut bahwa para Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya. Sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Sebelumnya, keputusan kontroversial PN Jakarta Pusat untuk menunda pemilu 2024 diketok dan dibacakan pada Kamis (2/3/2023) lalu.

Keputusan itu diambil usai majelis hakim memeriksa perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima terhadap KPU lantaran tak lolos dalam verifikasi partai.

Gugatan Partai Prima disetujui majelis hakim dan KPU dinilai telah melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, majelis hakim menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. (wid,rls,ist)



TAHAPAN DAN JADWAL PEMILU 2024

-  14 Juni 2022 hingga 14 Juni 2024
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan
-  14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023
Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
-  29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022
Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
-  6 Desember 2022 hingga 25 November 2023
Pencalonan anggota DPD
-  14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

-  28 November 2023 hingga 10 Februari 2024
Masa kampanye pemilu
-  19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
-  24 April 2023 hingga 25 November 2023
Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
-  14 Desember 2022
Penetapan peserta pemilu

KPK Cekal 4 Pimpinan DPRD Jatim ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Dana Hibah



Tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (6/3/2023). (istimewa)

JAKARTA - Kasus dugaan suap dana hibah Pemprov Jawa Timur (Jatim) dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak masih dalam penyidikan KPK. Terbaru, empat orang anggota DPRD Jatim dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

"Benar, masih terkait kebutuhan proses penyidikan perkara tersangka STPS dkk, tim penyidik telah mengajukan tindakan cegah ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemendiknas RI terhadap empat orang yang menjabat selaku anggota DPRD Jawa Timur periode 2019

sampai 2024," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).

Ali mengatakan proses pencegahan ini akan berlangsung selama enam bulan. Pencegahan kepada empat orang tersebut bakal berlaku hingga Juli 2023.

"Tentunya dapat diperpanjang kembali sepanjang diperlukan. Langkah cegah ini diperlukan antara lain agar para pihak dimaksud tetap berada di wilayah RI dan dapat selalu kooperatif hadir untuk memberikan

keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik," ujar Ali.

Keempat orang yang dicegah KPK di kasus suap dana hibah Pemprov Jatim merupakan pimpinan DPRD Pemprov Jatim. Salah satu yang dicegah ialah Ketua DPRD Pemprov Jatim Kusnadi. Tiga orang lainnya yang dicegah ialah Anik Maslachah, Anwar Soddad, dan Achmad Iskandar. Ketiga orang ini merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024.

Jejak Kasus

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak secara resmi mengumumkan Wakil Ketua (Waka) DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Selain Sahat Tua, tiga orang lain ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka yaitu STPS Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024," kata Johanis dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022).

Keempat orang tersebut ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Jawa

Timur (Jatim) pada Rabu (14/12/2022) malam.

KPK menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai sekitar Rp 1 miliar. Keempatnya ditangkap terkait dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah. Dana hibah yang diduga dikorupsi itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Diduga, Sahat Tua sudah menerima Rp 5 miliar.

Sahat Tua dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(wid,rls/dya)

Dukung Polisi Tindak Tegas Pelanggar Lalin di Surabaya, Balap Liar Jadi Atensi Wali Kota Eri

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama kepolisian dan TNI memastikan akan terus memberikan kenyamanan dan keamanan warga Kota Pahlawan, khususnya saat malam hari. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pelanggaran lalu lintas (Lalin) harus menjadi atensi.

"Kejadian-kejadian ini kan harus menjadi atensi betul. Menjadi atensi saya, pastinya wali kota dan Pak Kapolrestabes. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (7/3/2023).

Untuk diketahui, sebelumnya tiga orang petugas Satpol PP Surabaya saat menjalankan tugas ditabrak pemotor mabuk di Jalan Diponegoro pada Sabtu dini hari (4/3/2023).

Wali Kota Eri mengakui, banyak insiden kecelakaan yang disebabkan pengendara tidak tertib berlalu lintas seperti dalam keadaan mabuk. Oleh sebabnya, pihaknya siap mendukung kepolisian untuk mencegah kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Masih banyak yang melanggar aturan. Banyak sepeda motor tidak pakai helm, melawan arus. Kejadian ini yang sering menyebabkan

kecelakaan," kata Cak Eri, panggilan lekatnya.

Maka dari itu, Cak Eri menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya untuk menekan kasus pelanggaran lalu lintas. Terlebih lagi, ia menyebut, sekarang ini tilang manual bagi pelanggar lalu lintas sudah bisa kembali diterapkan.

"Ini (pelanggaran lalin) menjadi pembelajaran betul buat warga Surabaya, karena kalau begini terus kota ini menjadi tidak nyaman. Sehingga kita akan kuatkan lagi koordinasinya dengan Polrestabes untuk menjaga keamanan lalu lintas di Kota Surabaya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christianto menyatakan, pihaknya tak akan berhenti melakukan pengamanan Kota Pahlawan saat malam hari. Meski sebelumnya, tiga orang petugas Satpol PP ditabrak pemotor mabuk saat melakukan pengamanan di Jalan Diponegoro.

"Untuk pengamanan khususnya Jumat malam dan Sabtu malam terus kita lakukan di kota ini dengan seluruh camat dan tiga pilar. Kita tidak boleh



Satpol PP Kota Surabaya berkoordinasi dengan TNI-Polri terus melakukan penjagaan pada malam hari terutama di titik-titik rawan di Surabaya. (humas)

terlalu trauma atau down terkait dengan permasalahan ini. Kita harus tetap mengamankan kota ini," kata Eddy Christianto.

Eddy juga menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi atensi penguatan Pemkot Surabaya adalah mengenai pencegahan aksi balap liar. Pihaknya mengaku telah memetakan titik-titik lokasi yang biasa digunakan untuk aksi balap liar.

"Memang mereka itu tidak ngumpul di suatu tempat. Jadi ada di beberapa titik-titik, lalu melalui media komunikasi medsos (media sosial), mereka ngumpul di suatu titik,"

ungkap dia.

Menurutnya, lokasi yang digunakan untuk balap liar biasanya memiliki track panjang dengan kondisi aspal halus. Selain itu, lokasi yang dipilih biasanya juga terdapat lampu traffic light (TL) untuk titik start dan finish.

"Untuk balap liar biasanya (jalan) lurus, terus aspalnya halus, ada lampu TL-nya. Karena start tunggu TL hijau. Ada di MERR, Ahmad Yani, Margomulyo, terus di tengah kota juga ada di Margorejo. Itu juga kita jaga dan antisipasi bersama teman-teman camat," tandasnya. (mira,rls/dya)

Banding Sambo Sudah Teregister, Paling Lambat 3 Bulan Putusan Dibacakan

JAKARTA - Apa kabar kasus Sambo Cs dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat? Terbaru, berkas permohonan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terkait vonis pidana mati sudah teregister di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pejabat Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan menjelaskan soal tenggat persidangan di PT Jakarta. Binsar menjelaskan, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi memiliki waktu paling lambat 3 bulan untuk memutuskan suatu perkara.

"Sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan PT sudah harus menyelesaikan persidangan suatu perkara paling lambat dalam waktu 3 bulan," kata Binsar Selasa (7/3/2023).

Binsar menerangkan pihaknya juga menerima permohonan banding dari tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah istri Sambo, Putri Candrawathi kemudian Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal.

Binsar mengatakan berkas permohonan banding keempat terdakwa itu sudah masuk ke kepaniteraan PT Jakarta. Berkas tersebut sudah teregister dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI.

"Perkara-perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf sudah dikirim oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dan baru diterima serta sudah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI," kata Binsar.

Binsar mengatakan sidang pembacaan putusan belum ditentukan oleh majelis hakim. Sebab, hakim akan meneliti berkas tersebut dan bermusyawarah terkait putusannya nanti.

"Sedangkan sidang untuk membaca putusannya belum ditentukan oleh majelis hakim tingkat banding, karena masih akan mempelajari, meneliti berkas perkara yang bersangkutan untuk kemudian bermusyawarah mengambil putusan yang akhirnya akan dibacakan secara terbuka untuk umum," kata Binsar.

Diketahui, Ferdy Sambo dkk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

Kasus Arloji Mewah Jadi Sorotan Lagi

Di sisi lain, kuasa hukum Tony Sutrisno, Heroe Waskito membantah adanya tuduhan bahwa kasus dugaan penipuan dan pemerasan jam tangan mewah Richard Mille merupakan intrik mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

"Itu fitnah murahan. Isu bohong itu dibuat untuk menyudutkan klien saya dan agar kasus beliau dibiarkan begitu saja," kata Heroe dalam

keterangannya, Selasa (7/3/2023).

Dikatakan Heroe, kliennya itu merupakan korban kecurangan pihak Richard Mille Jakarta dan juga kelicikan oknum polisi yang ingin menguras harta kliennya.

Kemudian, kasus dugaan penipuan dan pemerasan itu telah terjadi sejak dua tahun lalu. Akan tetapi, pihak kepolisian tanpa alasan yang jelas menghentikan penyelidikan tersebut.

Selain itu, rumitnya penyelesaian kasus ini membuat Heroe curiga bahwa ada oknum-oknum yang disuap alias tidak bersih agar kasus ini dihentikan.

"Adanya oknum kepolisian yang tidak bersih itu fakta. Klien kami saja sampai diperas miliaran rupiah oleh oknum polisi di Bareskrim. Contohnya Rizal Irawan, Kopol Teguh dan Andi Rian yang sekarang enak menjabat sebagai Kapolda. Kami buka-bukaan saja. Klien kami sangat dirugikan," ucapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan jam Richard Mille senilai Rp 77 miliar dinilai telah masuk dalam catatan Ferdy Sambo saat masih aktif menjabat Kadiv Propam Polri.

"Berkas atau laporan masyarakat tentang hal-hal yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai standar profesi, Provos kan punya data. Provos ini punya atasan, Kadiv Propam. Peran Kadiv Propam sebagai big data berbagai pelanggaran di lingkungan kepolisian itu terdata dengan baik. Ini kapan saja bisa dilempar, itu bisa saja terjadi," kata Dosen PTIK, Alfons

Loemau dalam keterangannya, Sabtu (18/2/2023).

Menurut Alfons, adanya indikasi kuat keterkaitan kasus penipuan dan pemerasan dalam perkara Richard Mille dengan upaya Sambo membuka kartu truf kepolisian.

Selain itu, ia juga menyinggung pihak yang memimpin rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J adalah pihak yang saat ini yang diduga tersangkut perkara Richard Mille.

"Rekonstruksi kasus Ferdy Sambo kan dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Andi Rian Djajadi). Direktur Tindak Pidana Umum pada saat itu dan Wakabareskrim, (adalah) orang-orang yang menentukan skenario selanjutnya, setelah rekonstruksi dan pra-rekonstruksi," ucapnya.

"Orang-orang ini terindikasi, diduga terkait dengan kasus Richard Mille," tambah Alfons.

Lebih lanjut Alfons menduga bahwa kasus itu akan terus dimainkan oleh Sambo. Apalagi setelah dirinya divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Kita lihat dari upaya banding (Ferdy Sambo) ini bagaimana kira-kira nanti memberikan hasil yang sesuai harapan. Menurut saya, pada era diajukan banding ini, dia diam-diam sambil mulai susun langkah-langkah serangan balik. Serangan balik ini akan dimulai apabila banding ini tidak memenuhi harapan," imbuhnya. (wid,rls,ist/dya)

BHARADA RICHARD ELIEZER

Dituntut Penjara
12 TAHUN

Divonis Penjara
1,5 TAHUN
(TIDAK MENGAJUKAN BANDING).

KUAT MA'RUF

Dituntut Penjara
8 TAHUN

Divonis Penjara
15 TAHUN
(BANDING)

FERDY SAMBO

Dituntut Penjara
SEUMUR HIDUP,

Divonis
HUKUMAN MATI
(BANDING)

PUTRI CANDRAWATHI

Dituntut Penjara
8 TAHUN

Divonis Penjara
20 TAHUN
(BANDING)

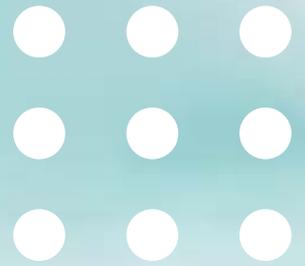
BRIPKA RICKY RIZAL

Dituntut Penjara
8 TAHUN

Divonis Penjara
13 TAHUN
(BANDING)



UTUSAN DAN TUNTUTAN UNTUK PARA TERDAKWA DALAM KASUS PEMBUNUHAN YOSUA:



NATHALIE HOLSCHER MAIN KE RUMAH SULE, *Netizen Doakan Rujuk*

Foto : Instagram/@nathalieholscher



ikut bahagia seneng deh liat nya, Bismillah semoga bisa rujuk bun," ungkap akun lainnya.

Nathalie Holscher tak memberikan respons tanggapan netizen tersebut. Ia hanya tertawa saat ada yang memintanya kembali ke pelukan Sule.

"Hehe," jawab Nathalie Holscher.

Sule dan Nathalie Holscher menikah pada 15 November 2020. Pernikahan itu terlaksana bertepatan dengan ulang tahun Sule. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Adzam.

Namun, belum ada dua tahun, pernikahan itu kandas di tengah jalan.

Nathalie Holscher melayangkan gugatan cerainya pada Sule pada 3 Juli 2022. Gugatan cerai tersebut resmi dikabulkan Pengadilan Agama Cikarang pada 10 Agustus 2022.

Karier

Nathalie Holscher menikah dengan komedian Sule pada 15 November 2020. Acara pernikahan keduanya dilangsungkan di Bekasi Jawa Barat dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Rans Entertainment.

Saat ini, Nathalie telah memiliki anak kandung dari pernikahan tersebut yakni Adzam Ardiansyah Sutisna.

Sebelum resmi menikah, Nathalie dan Sule sudah saling kenal satu sama lain sejak tahun 2013. Namun kedekatan mereka akhirnya diketahui oleh publik sejak Juli tahun 2020.

Bahkan Nathalie Holscher juga harus menjadi seorang muafaf untuk dapat menikah dengan Sule. Proses muafafnya Nathalie juga ditemani oleh Sule dan ia juga menghapus beberapa tato yang terdapat pada tubuhnya.

Nathalie Holscher lahir pada 14 Desember 1992 di Jakarta Indonesia. Adapun orang tua Nathalie yakni bernama Lian Tomana.

Nathalie

Holscher dikenal sebagai seorang pembawa acara, penyanyi, DJ, dan model yang berkebangsaan Indonesia.

Nathalie mengawali kariernya sebagai seorang penyanyi dalam duo grup bersama Indra The Titans bernama Rannath.

Perempuan yang kini berusia 34 tahun tersebut juga pernah tergabung dalam vokal grup yang bernama D'Dolls bersama dengan Dewi Muninggar.

Beberapa single pernah diluncurkan oleh vokal grup tersebut diantaranya Hapus Kamu, Salah Memilih Cinta, dan Akhir Cerita Cinta.

Tidak lama kemudian, Nathalie bergabung bersama band The Secret yang didirikan oleh Piyu Padi dan Makki Ungu. Nathalie bersama The Secret sempat mengeluarkan single berjudul Semesta (Sayang Lepaskan Aku).

Nathalie Holscher juga sempat menjadi penyanyi solo hingga mengeluarkan single berjudul Live of a Party yang dikemas dengan musik EDM. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan kariernya sebagai seorang DJ EDM bahkan masuk nominasi top 100 DJanes pada tahun 2018 (berbagai sumber)

NATHALIE Holscher baru-baru ini pamer kebersamaannya dengan Sule. Hal ini membuat heboh netizen bahkan sampai mendoakan keduanya untuk kembali rujuk.

Ya, baru-baru ini Nathalie Holscher pamer kebersamaannya dengan Sule. Ia mendatangi rumah mantan suaminya tersebut bersama dengan Adzam.

Nathalie Holscher mengunggah video "a day in my life pulang ke Tambun" di laman instagram miliknya.

Dalam caption video instagram, Nathalie Holscher hanya menyematkan emoji bentuk hati berwarna putih.

Video itupun langsung menyita atensi publik. Banyak yang merindukan momen bahagia mereka sebagai keluarga utuh hingga meminta keduanya untuk rujuk.

Hal ini terlihat dari kolom komentar Instagram Nathalie.

"bisa ga sih balik lagi inget banget pas hamil azzam @nathalieholscher aku kesana @nathalieholscher beliin berlian ke @ferdinan_sule," tulis netizen.

"Alangkah indahnya jika mereka jadi 1 keluarga yg utuh lagi.. seneng liat kebersamaan mereka..," beber yang lain.

"Coba klu gk pisah.. Pasti tu anak2 bs main sm2 tiap hari.. Tiap plg sekolah abg ny gk sabaran mw pulang cepat demi liat adek sm mama ny.. Kasian emang," jelas akun lainnya.

"Ayo bund bisa ayo balikan sama kang @ferdinan_sule," tulis akun yang lain.

"Semoga rujuk lagi.. Aamiin (emoji love)," ujar netizen lain.

"Masya allah tab barokallah bun





WAKTU TERBAIK BEROLAHRAGA UNTUK BAKAR LEMAK

Peneliti dari Karolinska Institutet di Swedia dan University of Copenhagen di Denmark melalui sebuah studi yang diterbitkan dalam *Proceedings of the National Academy of Sciences* menemukan pagi hari menjadi waktu terbaik untuk berolahraga guna membakar lebih banyak lemak.

Profesor di departemen kedokteran molekuler dan bedah serta departemen fisiologi dan farmakologi di Karolinska Institute Juleen R. Zierath mencatat temuan ini dapat bermanfaat bagi orang yang kelebihan berat badan yang mungkin berjuang untuk menurunkan berat badan.

"Olahraga di pagi hari bisa lebih efektif daripada olahraga di malam hari dalam hal meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak dan berolahraga pada waktu ini terbukti bermanfaat bagi orang yang kelebihan berat badan," kata dia seperti disiarkan *Medical Daily* dan *New York Post* beberapa waktu lalu.

Berolahraga pada waktu yang berbeda dalam sehari memengaruhi tubuh dengan cara yang berbeda karena proses biologis yang bergantung pada ritme sirkadian.

Untuk keperluan studi, peneliti mempelajari dua kelompok tikus. Satu kelompok melakukan latihan intensitas tinggi di pagi hari.

Sebelumnya, studi dari Warren Alpert Medical School di Brown University menemukan berolahraga pada waktu yang sama setiap hari secara teratur menghasilkan penurunan berat badan yang baik dibandingkan dengan berolahraga pada waktu yang acak dalam sehari.

Studi tahun 2019 mengklaim bahwa terlepas dari waktu tertentu dalam sehari latihan rutin, konsistensi waktu adalah yang terpenting dalam memastikan keberhasilan penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan.

Cegah kematian dini

Sebelumnya para peneliti menemukan bahwa gerakan sederhana seperti berjalan selama 11 menit per hari sudah dapat

menurunkan kemungkinan kematian dini.

Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan dalam *British Journal of Sports Medicine*, tim peneliti berusaha untuk menentukan hubungan dosis-respons antara aktivitas fisik non-pekerjaan dan beberapa penyakit kronis dengan hasil kematian pada populasi orang dewasa.

Untuk semua penyebab kematian, kondisi yang dipertimbangkan untuk penelitian yakni termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, dan kanker.

Tim peneliti meninjau 196 artikel, termasuk 94 kelompok dengan lebih dari 30 juta peserta. Studi juga memantau peserta selama rata-rata 10 tahun untuk mengetahui kebiasaan olahraga, serta tingkat penyakit dan kematian mereka. Hal itu membuat penelitian ini terbesar dari jenisnya, menurut *Live Science*.

Para peneliti menemukan bahwa menghabiskan setidaknya 11 menit per hari untuk aktivitas fisik, atau 75

menit per minggu, sudah dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 17 persen. Jumlah yang sama dikaitkan dengan penurunan 7 persen dalam risiko kanker.

Mereka menunjukkan bahwa aktivitas fisik sedang selama 11 menit, seperti jalan cepat, dapat menurunkan risiko kematian dini sebesar 23 persen. Jadi jika setiap orang melakukan ini setiap hari, 1 dari 10 kematian dini dapat dicegah.

"Jika Anda seseorang yang menganggap ide aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit seminggu agak menakutkan, maka temuan kami seharusnya menjadi kabar baik," kata Dr. Søren Brage, dari unit epidemiologi Medical Research Council Cambridge.

Aktivitas fisik sedang didefinisikan sebagai aktivitas yang meningkatkan detak jantung dan mempercepat pernapasan. Tidak perlu melibatkan olahraga atau lari, yang membuat orang sulit bernapas (Ant)



TikTok Bikin Fitur Pembatasan Konten Pengguna Remaja

APLIKASI berbagi video pendek TikTok sedang mengembangkan alat yang akan memungkinkan orang tua untuk mencegah anak remaja mereka mengakses konten tertentu di platform tersebut.

Pengembangan fitur kontrol orang tua sedang dalam tahap awal dan aplikasi akan berkonsultasi dengan organisasi pengasuhan anak, pemuda dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang alat tersebut, kata TikTok, dilaporkan Reuters, Jumat.

Orang tua bisa menggunakan alat itu supaya anak remaja tidak bisa melihat konten dengan kata atau tanda pagar tertentu.

Bersamaan dengan itu, TikTok juga mengumumkan fitur baru untuk membantu pengguna membatasi jumlah waktu yang mereka habiskan di aplikasi. Akun milik pengguna di bawah 18 tahun secara otomatis memiliki batas waktu satu jam per hari dan remaja harus memasukkan kode sandi untuk lanjut menggunakan aplikasi.

Jika remaja memilih untuk menghapus batas harian dan menggunakan TikTok selama lebih dari 100 menit per hari, aplikasi akan menampilkan peringatan yang meminta mereka untuk menetapkan batas waktu.

Sekarang, orang tua dapat menetapkan batas waktu penggunaan TikTok bagi anak remaja mereka, kata perusahaan asal China itu.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi ByteDance, menghadapi pengawasan di seluruh dunia karena kedekatannya dengan pemerintah China dan menyangkut perlindungan data pengguna.

Aplikasi yang sangat populer di kalangan pengguna muda itu telah

dilarang dari ponsel milik pemerintah di Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain karena masalah keamanan.

Seperti aplikasi media sosial lainnya, TikTok juga menghadapi kritik karena tidak memberi perlindungan cukup bagi remaja dalam mencegah akses konten yang tidak pantas.

Ramadan with TikTok

Sebelumnya TikTok meluncurkan studi bertajuk "Ramadan 2023 with TikTok: Winning Hearts and Carts" yang berisi ragam tren konten dan tren perilaku pengguna TikTok.

Hasilnya, 67 persen pengguna berbelanja lebih banyak selama Ramadhan.

Sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Rabu, studi TikTok kali ini juga menilik ragam gaya dan faktor pendorong berbelanja pengguna TikTok dalam upayanya mendapatkan value for money, di mana 51 persen responden menyatakan bahwa diskon menjadi pendorong untuk berbelanja.

Kemudian, produk bundling atau paket spesial Ramadhan membuat responden dua kali lebih cenderung melakukan pembelian.

Sebanyak 97 persen responden juga menyatakan bahwa TikTok masih menjadi pilihan mereka untuk mencari inspirasi produk atau jasa.

Menurut perusahaan konsultasi berbasis data dan insight, Kantar, masyarakat menjadi lebih kritis dalam berbelanja.

Terlebih, masyarakat kini memiliki pilihan yang lebih banyak, yakni secara offline dan online.

"Belum lagi kegiatan mudik dan bepergian turut mempengaruhi titik konsumsi masyarakat, sehingga tidak lagi hanya terpusat di kota-kota besar. Selain itu, adanya kenaikan harga juga membuat konsumen menjadi lebih cermat dalam mengatur pengeluaran," kata Corina Fajriyani selaku Senior Marketing Manager Kantar Worldpanel Division (Ant)



INEMURI

Tidur Siang di Tempat Kerja ala Jepang

DI SEBAGIAN besar negara, tidak diperbolehkan bagi seorang karyawan untuk tidur di kantor atau tempat kerja. Akan ada sanksi bahkan pemecatan jika tidur saat sedang bekerja.

Tapi di Jepang, tidur siang di kantor adalah hal biasa. Bagi orang Jepang, pekerja yang tidur di kantor menandakan ia sudah bekerja hingga kelelahan sehingga butuh istirahat.

Budaya ini dinamakan Inemuri. Secara umum, inemuri artinya tidur saat sedang bertugas atau tidur di tempat kerja.

Tidak hanya di kantor, inemuri juga menjadi pemandangan biasa di tempat-tempat umum seperti stasiun kereta, di kelas, bahkan di tangga mal.

SEJARAH INEMURI

Melansir Culture Trip, tidur siang di depan umum sudah lama dilakukan di Jepang. Tapi inemuri baru berkembang pesat setelah ledakan

ekonomi Jepang pascaperang.

Perkembangan perekonomian Jepang pada tahun 1960 hingga 1980-an, membuat negara ini mengalami pertumbuhan pesat bahkan menjadi salah satu kekuatan utama dunia.

Hal ini berdampak baik pada pekerjaan dan perekonomian masyarakat.

Tapi kemajuan ini juga mengakibatkan tingginya mobilitas masyarakat, dan membuat mereka sangat sibuk bekerja keras.

Padatnya aktivitas bekerja tapi kurangnya waktu istirahat yang membuat gagasan inemuri semakin berkembang dan lumrah di Jepang.

BUDAYA INEMURI

Menurut The New York Times, inemuri paling umum dilakukan pekerja senior yang bekerja kantor.

Dibandingkan karyawan junior yang berusaha tetap produktif meski juga menghadapi jam kerja yang tinggi.

Inemuri sudah dipraktikkan di Jepang selama setidaknya 1.000 tahun, dan tidak dibatasi di tempat kerja.

Tapi tak menutup kemungkinan orang-orang juga memilih menutup mata sejenak di department store, kafe, restoran, bahkan tempat nyaman di trotoar.

Lalu kenapa inemuri lebih diterima di Jepang daripada di tempat atau negara lain? Sebenarnya tak ada alasan spesifik.

Banyak faktor yang jadi penyebabnya. Tapi perlu diketahui, kerja lembur adalah bagian dari budaya kerja Jepang.

Sebagian besar pekerja kantor bahkan bisa bekerja selama 10 jam atau lebih setiap harinya.

Inemuri banyak ditemukan di distrik-distrik super sibuk di Jepang, misalnya di Shinjuku dan Shibuya pada dini hari. Terlebih, orang Jepang memang sangat bergantung pada transportasi publik.

Selain itu, kebiasaan minum di bar atau izakaya setelah bekerja juga umum dilakukan. Jadi tak asing jika menemukan seorang pekerja pria di tangga, bangku umum bahkan lantai kereta sambil tertidur.

Meskipun ini merupakan kebiasaan yang tidak lazim di Indonesia, tidur siang sesungguhnya memiliki beberapa macam manfaat. Manfaat tersebut diantaranya:

Meningkatkan Stamina Bekerja

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Universitas Harvard,

Amerika Serikat, tidur siang 60-90 menit dapat memperbaiki stamina, sama seperti tidur selama 8 jam di malam hari. Bahkan, dampaknya akan semakin baik jika Anda terlelap sambil bermimpi.

Meningkatkan Fokus dan Konsentrasi Saat Bekerja

Studi yang dilakukan di Universitas California (AS) menghasilkan kesimpulan bahwa tidur siang membantu kinerja otak lebih baik. Ketika kinerja otak membaik, seseorang akan lebih mudah fokus dan berkonsentrasi saat bekerja

Tidur Siang Membantu Seseorang untuk Menjadi Lebih Kreatif

Jeda tidur siang dianggap dapat mengembalikan energi yang hilang, sehingga seseorang dapat kembali produktif bekerja.

Ketika rasa lelah yang dirasakan hilang, kemungkinan besar seseorang lebih segar untuk bekerja. Dengan begitu, kreativitas juga dapat muncul dengan lebih mudah.

Risiko Penyakit Jantung

Sebuah studi mengaitkan antara tidur siang dengan penurunan risiko penyakit Jantung. Studi selama 6 tahun tersebut melibatkan 23.681 pria di Yunani. Hasilnya, partisipan yang tidur siang lebih dari 3 kali per minggu, turun risiko terkena penyakit jantung hingga 37 persen. (berbagai sumber)

Mendongkel Tiap (dari hal 1)

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 40 lebih rekening milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Akun rekening yang dibekukan ini terdiri dari rekening milik pribadi dan perusahaan atau badan hukum.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine.

Lebih lanjut, PPATK mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri. Diduga ada dua orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi dua nama tersebut.

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menganiaya anak pengurus GP Ansor. Rafael yang merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp56 miliar.

KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan terkait Rafael. Dalam proses ini, lembaga antirasuah itu akan mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan arus transaksi dari enam perusahaan yang sahamnya dimiliki mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sudah diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan hasilnya akan disampaikan ke KPK.

"Semuanya sudah diperiksa. Nanti Irjen (Irjen Kemenkeu) yang sampaikan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Sri Mulyani dalam kesempatan itu menjawab mengenai permintaan KPK agar Kemenkeu menelusuri arus transaksi dari enam perusahaan terkait Rafael Alun.

Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael dari jabatan eselon III di Ditjen Pajak Kemenkeu. KPK dan Itjen Kemenkeu sudah bekerja sama memeriksa Rafael untuk mengklarifikasi soal harta dan asetnya.

Pemecatan Tak Pengaruhi Penyelidikan

Terbaru Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan etik terhadap eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Dari hasil pemeriksaan, Rafael terbukti ada pelanggaran disiplin berat.

"Audit investigasi RAT sudah kita selesaikan, terbukti ada pelanggaran disiplin berat," ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh Selasa (7/3/2023).

Awan mengatakan, saat ini Rafael

Alun sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan Rafael segera akan dipecat dari jabatannya saat ini dan juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terpisah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan keputusan Kementerian Keuangan untuk memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai PNS tidak akan mempengaruhi proses penelusuran kasus harta jumbonya.

Alexander menekankan, keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak untuk memecat Rafael Alun sepenuhnya hak mereka. Sehingga, sudah jelas pelanggaran hukum Rafael di sana.

"Dipecat, diberhentikan, di-non-job, tentukan harus ada pelanggaran yang bersangkutan, dan itu kan menjadi domain Itjen Kemenkeu atau KITSDA di Ditjen Pajak," ujar Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Meski demikian, Alexander menegaskan, hasil pemecatan Rafael dan pembuktian pelanggaran sebagai PNS atau ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu tidak akan memengaruhi cara pandang KPK dalam menelusuri laporan harta kekayaan jumbo Rafael yang mencapai Rp56,1 miliar.

"Kami di KPK tidak berwenang untuk menjudge atau menilai apakah hukuman disiplin yang bersangkutan atau penonjolan yang bersangkutan. KPK hanya terkait harta kekayaan yang bersangkutan yang dilaporkan di LHKPN," tuturnya.

Ia memastikan seluruh proses penelusuran kasus Rafael, untuk mencari peristiwa hukum tindak pidana korupsi yang diduga dilakukannya, baik dalam bentuk suap atau gratifikasi, hingga kini masih terus berjalan. Bahkan sudah memasuki tahap penyelidikan.

"Kita lihat apakah yang senilai Rp 56 miliar atau Rp 57 miliar itu sesuai dengan profil yang bersangkutan dan sebagainya, termasuk yang diklarifikasi hari ini, kan semua masih berjalan," ungkap Alexander.

KPK juga akan mendalami semua pihak yang terkait dengan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Termasuk, KPK akan mendalami potensi kaitan antara Rafael Alun dengan Angin Prayitno Aji.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan saat ini kasus Rafael Alun sudah dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, ia mengatakan menyebut KPK akan mendalami sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi.

"Ya nanti ikuti dulu prosesnya karena sekali lagi dalam proses penyelidikan sangat terbatas informasinya tidak semuanya bisa kami sampaikan," ujar Ali.

Meski begitu itu, Ali menyebut saat ini KPK masih akan berfokus menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi Rafael Alun terlebih dahulu.

"Informasi yang peroleh, dari hasil paparan Tim LHKPN KPK yang

dihadiri oleh lintas Direktorat di KPK dan juga Pimpinan KPK, disepakati terkait pemeriksaan LHKPN RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan," kata Ali.

Angin Prayitno sendiri merupakan terpidana kasus gratifikasi dan suap pajak senilai Rp 55 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Angin dengan hukuman sembilan tahun dan denda Rp.300 juta. Kasus tersebut mengungkap permainan sejumlah pegawai pajak untuk memanipulasi pungutan pajak sejumlah perusahaan.

Angin Prayitno sendiri sudah mengkonfirmasi dirinya kenal dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, ia membantah memiliki hubungan dengan Rafael Alun Trisambodo.

"Tau, hanya mengenal sebagai pegawai pajak," ujar dia pada Selasa (7/3/2023) usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemerintah Diminta Perkuat Audit Forensik

Ahli hukum pidana Todung Mulya Lubis menilai pemerintah perlu memperkuat audit forensik buat mencegah dan menelusuri aparat sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara yang diduga memiliki kekayaan tidak wajar, seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

Menurut Todung, kemampuan forensik audit harus diperkuat karena cara pelaku menyembunyikan atau menyamarkan harta dari hasil kejahatan keuangan juga sangat canggih.

"Tidak semua orang bisa melakukan transaksi bank. Apalagi bicara 'uang panas'. Mereka kebanyakan melakukan transaksi di luar perbankan. Makanya kita butuh forensik audit. Ini harus dipunyai dan diperkuat," kata Todung, Selasa (7/3/2023).

Todung mengatakan, kemampuan audit forensik harus dimiliki dan diperkuat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polri, dan Kejaksaan.

Audit forensik merupakan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan perusahaan atau personal guna mendapatkan bukti pada saat di pengadilan atau saat proses hukum berlangsung.

Dalam rangka melakukan audit forensik, dibutuhkan prosedur akuntansi untuk mengaudit dan pengetahuan ahli tentang hukum audit itu sendiri. Dalam hal ini, audit forensik mencakup berbagai kegiatan investigasi yang kerap dilakukan untuk menuntut suatu pihak atas penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang berkaitan dengan keuangan lainnya.

Kemampuan audit forensik, kata Todung, sangat dibutuhkan para penegak hukum buat membantu mengungkap dan mengidentifikasi aliran dana dari hasil tindak pidana yang disembunyikan pelaku.

Todung menilai sangat wajar jika masyarakat mempertanyakan harta kekayaan pejabat publik yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan. Sebab gaji para pejabat publik itu juga dibayar dari pajak yang

dipungut dari masyarakat.

"Di sinilah undang-undang itu diperlukan. Undang-undang kan perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap pejabat kan," ucap Todung.

Menurut Todung, mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga seharusnya menjadi kendali supaya setiap pejabat negara bisa mempertanggungjawabkan asal-usul hartanya.

Todung menyampaikan, jika seorang harta kekayaan ASN atau pejabat negara naik secara drastis maka lembaga yang bertugas mengawasi patut mencurigai.

"Ketika kekayaan itu naik secara drastis di luar kewajaran ya harusnya ada audit ke yang bersangkutan. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana lalu kemudian kan bisa disidik. Tapi memang lebih bagus kalau ada undang-undang yang mengatur pidana kekayaan tak wajar," ujar Todung. (wid,rls,ant,ist/dya)

DAFTAR PELANGGARAN BERAT YANG BISA BIKIN PNS DIPECAT

Berdasarkan Pasal 5 aturan tersebut, berikut daftar larangan untuk para PNS:

- menyalahgunakan wewenang;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- melakukan pungutan di luar ketentuan;
- melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Diperiksa KPK Selama 8,5 Jam Buntut Pamer Harta Eko Darmanto: Data Privat Dicuri Lalu Diframing



Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto (belakang) didampingi istri (berhijab) memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi terkait LHKPN, Selasa (7/3/2023). (Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto beserta istrinya Selasa (7/3/2023). Keduanya menjalani pemeriksaan untuk mengklarifikasi harta kekayaan Eko.

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, mengaku tidak berniat memamerkan harta dan kendaraan mewah di media sosialnya. Ia berdalih bahwa data pribadinya dicuri lalu diframing.

Eko Darmanto mengaku tidak pernah berniat dan bermaksud untuk pamer harta, seperti yang viral di media sosial.

"Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya, yang saya simpan secara privat dicuri, kemudian di-framing dan beredar seperti yang rekan-rekan sekalian ketahui," kata Eko kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK usai dimintai klarifikasi terkait LHKPN oleh KPK, Selasa (7/3/2023).

Setelah kemudian viral, Eko mengaku hanya diam atas perintah atasan. "Saya tidak memberikan klarifikasi atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apa pun. Saya sebagai prajurit yang baik saya melaksanakan itu," dalihnya.

Akan tetapi, lanjut dia, jika potretnya viral dan hal tersebut mencederai perasaan masyarakat, mencederai kepercayaan publik terhadap pimpinannya, baik di Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dia meminta menyampaikan maaf.

"Saya memohon maaf," pendeknya.

"Terakhir, atas isu yang paling sentral, saya tidak punya pesawat. Itu merupakan milik PASI [Federasi Aero

Sport Indonesia] dan sudah terverifikasi dan terkonfirmasi," tegasnya.

Adapun potongan di Instagram, menurut Eko itu bukan pamer. "Itu private, tidak pamer," kata dia.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan alasan turut diperiksanya sang istri guna untuk mengklarifikasi sejumlah harta kekayaan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Eko. Sebab, menurut dia, di dalam LHKPN itu terdapat sejumlah harta atas nama perempuan bernama Ari Murniyanti yang merupakan istri Eko.

"Harta itu dari wajib lapor setidaknya bisa tiga nama, atas nama dirinya sebagai penyelenggara negara, atas nama pasangannya, kemudian anaknya. Otomatis kemudian ketika klarifikasi jika dibutuhkan, pihak-pihak yang terkait di LHKPN ya pasti kemudian turut dilakukan klarifikasi," kata Ali.

Ali juga menegaskan pemeriksaan serta sang istri bukan untuk mengkonfrontir keterangannya dengan Eko. Ia menjelaskan pemeriksaan serta sang istri tersebut dalam rangka agar lebih menjelaskan terkait harta kepemilikan Eko.

"Ini kan bukan dalam proses penindakan seperti penyidikan yang itu bisa dikonfrontir, ini kan proses klarifikasi proses kroscek terhadap data," ujar dia.

Harta kekayaan Eko jadi sorotan setelah foto dan videonya tersebar

Harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan masyarakat setelah dia disebut kerap memamerkannya di media sosial Instagram. Setelah nama Eko mencuat, akun Instagram

@eko_darmanto_bc pun menghilang.

Eko disebut kerap memamerkan motor gede Harley Davidson dan koleksi mobil antiknya. Selain itu, Eko juga disebut memiliki koleksi berbagai barang mewah lain seperti pesawat.

Atas masalah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko Darmanto dari jabatannya. Hal itu dilakukan agar mempermudah proses pemeriksaan terhadap Eko.

Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta Eko tercatat menyentuh Rp 15,7 miliar, sementara utangnya Rp 9 miliar. Sehingga total hartanya Rp 6,7 miliar di 2021.

Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Tak Wajar

JAKARTA (Lenteratoday) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai pekan ini melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai berharta tak wajar. Pemanggilan dideadline selesai seluruhnya dalam dua pekan ke depan.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Selasa (7/3/2023) mengatakan pemanggilan dilakukan dalam rangka klarifikasi dan pemeriksaan. "Mulai Senin (6/3/2023) sudah kita lakukan pemanggilan (69 pegawai harta tak wajar) untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Targetnya kita selesaikan dalam 2 minggu ini," kata Awan.

Saat ditanya lebih lanjut terkait pemanggilan pegawai Kemenkeu yang memiliki harta tak wajar, Awan meminta semua pihak menunggu keseluruhan hasil yang nantinya akan disampaikan.

"Sekarang masih dalam proses, nanti kami jelaskan kalau sudah ada hasilnya," ujarnya.

Sebelumnya Awan menyatakan ada 69 pegawai Kemenkeu yang hartanya terindikasi bermasalah. Hal ini diketahui dari ketidaksesuaian jumlah harta dengan profil risiko pegawai yang bersangkutan.

Lebih rinci dijelaskan ada 33 pegawai yang LHKPN tahun 2019-nya tidak sesuai dan 36 pegawai sisanya LHKPN tahun 2020-nya tidak sesuai. Awan mengaku sudah mengantongi nama-nama pegawai tersebut.

"69 yang tidak clear itu akan kita panggil, ini bagian dari menelaah risiko, akan kita panggil klarifikasi dan periksa kalau ada indikasi fraud tingkat risiko tinggi akan kita investigasi," ujar Awan dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023). (wid,rls,ist/dya)

GAJI PEJABAT DITJEN BEA CUKAI

- Golongan III a sebesar Rp 2.579.400 sampai Rp 4.236.400.
- Golongan III b sebesar Rp 2.688.500 sampai Rp 4.415.600.
- Golongan III c sebesar Rp 2.802.300 sampai Rp 4.602.400.
- Golongan III d sebesar Rp 2.920.800 sampai Rp 4.797.000.
- Golongan IV a sebesar Rp 3.044.300 sampai Rp 5.000.000.
- Golongan IV b sebesar Rp 3.173.100 sampai Rp 5.211.500.
- Golongan IV c sebesar Rp 3.307.300 sampai Rp 5.431.900.
- Golongan IV d sebesar Rp 3.447.200 sampai Rp 5.661.700.
- Golongan IV e sebesar Rp 3.593.100 sampai Rp 5.901.200.
- Golongan II d sebesar Rp 2.399.200 sampai Rp 3.820.000.

TUNJANGAN PEGAWAI BEA CUKAI UNTUK GOLONGAN LAIN.

- Golongan I a sebesar Rp 1.560.800 sampai Rp 2.335.800.
- Golongan I b sebesar Rp 1.704.500 sampai Rp 2.472.900.
- Golongan I c sebesar Rp 1.776.600 sampai Rp 2.577.500.
- Golongan I d sebesar Rp 1.851.800 sampai Rp 2.686.500.
- Golongan II a gaji pegawai Bea Cukai sebesar Rp 2.022.200 sampai Rp 3.373.600.
- Golongan II b sebesar Rp 2.208.400 sampai Rp 3.516.300.
- Golongan II c sebesar Rp 2.301.800 sampai Rp 3.665.000.
- Golongan II d sebesar Rp 2.399.200 sampai Rp 3.820.000.

